

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak perhatian dan inisiatif ditujukan untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk pihak perbankan. Peran UKM dalam perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia, memang tidak bisa dipandang sebelah mata karena jumlah UKM di Indonesia mencapai 62.9 juta dan sektor UKM di Indonesia mampu menyerap 116,6 juta tenaga kerja, dan mempunyai andil terhadap 14,94% nilai ekspor (Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, *Statistik Indonesia*, Jakarta 2017)

Selain menyerap tenaga kerja, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM (2018) menyebutkan pada tahun 2017 UKM menyumbang sebesar 57,08% Produk Domestik Bruto dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 60.34% Produk Domestik Bruto. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 UKM merupakan perusahaan kecil dan menengah yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

UMKM sampai saat ini masih menjadi salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1997 banyak usaha-usaha besar berjatuh, namun UMKM tetap berdiri dan membantu perekonomian negara salah satunya dengan menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Fenomena tersebut kembali terjadi pada masa pandemi saat ini. Banyak perusahaan besar yang harus

mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK demi mempertahankan keberlangsungan usaha ditengah kondisi sulit seperti ini.

Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan menyebabkan sebagian besar masyarakat memilih membuka usaha untuk mempertahankan hidup, salah satu usaha yang banyak diminati adalah usaha yang bergerak dibidang makanan. Hal ini lagi-lagi menunjukkan UMKM dapat menyelamatkan perekonomian negara dan membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi saat ini.

Sektor usaha dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan masih menjadi sektor usaha kecil menengah yang unggul di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah dalam sektor industri makanan menjadi peringkat pertama yaitu sebesar 1.74 juta usaha, disusul dengan industri kayu dengan jumlah sebesar 0.59 juta usaha, selanjutnya peringkat ketiga yaitu industri pakaian jadi sebesar 0,57 juta usaha, dan pada peringkat keempat diisi dengan industri tekstil 0,27 juta usaha (Profil Industri Mikro dan Kecil, BPS 2018).

Sumatera Barat mengelompokkan bidang kewirausahaan menjadi Industri Mikro dan kecil. Industri Mikro dan Kecil ini terdiri dari beberapa industri yaitu industri makanan, industri pakaian jadi dan industri tekstil, ke tiga industri tersebut menjadi industri yang paling banyak jumlah usaha yang ada di Sumatera Barat. Menurut data BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Barat (2018), jumlah usaha pada industri makanan sebesar 40.544 usaha, industri pakaian jadi 20.845 usaha dan industri tekstil 17.496 usaha.

Pengolahan produk hasil peternakan mendominasi UKM kuliner di Sumatera Barat. Berbagai macam produk hasil ternak yang dapat diolah menjadi

sumber protein yaitu: daging, susu, dan telur. Masyarakat di Sumatera barat banyak memanfaatkan hasil ternak tersebut menjadi sebuah olahan makanan yang sangat digemari masyarakat. Berbagai usaha makanan olahan hasil ternak yang sangat populer di Sumatera Barat yaitu rendang, dendeng, kerupuk kulit, telur asin, telur pindang, rendang telur, yoghurt, kefir, keju, keju mozarella dan lain-lain.

Sebagian besar UKM di Sumatera Barat didirikan oleh pelaku usaha dengan pendidikan yang relatif rendah, hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menjalankan manajemen keuangan perusahaan. Pengetahuan pelaku usaha yang minim mengenai literasi keuangan membuat para pelaku usaha memberi dampak negatif kepada usaha itu sendiri, seperti sulitnya mengakses pinjaman modal dari berbagai institusi keuangan yang menawarkan pinjaman modal usaha, seperti bank, leasing, asuransi dan lain-lain.

Tabel 1.1 Data tingkat Literasi dan Inklusi keuangan di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Inklusi	Literasi
1	Sumatera Utara	93,98	37,96
2	Kepulauan Riau	92,13	45,67
3	Riau	86,39	43,19
4	Aceh	86,09	44,36
5	Bengkulu	85,56	34,12
6	Sumatera Selatan	85,08	40,05
7	Sumatera Barat	66,75	34,55
8	Jambi	64,83	35,17
9	Bangka Belitung	64,57	35,70
10	Lampung	61,94	30,79

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keangan 2019, provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ketujuh dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Tingkat literasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 66,75 dan tingkat inklusinya sebesar 34,55, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya

pengetahuan tentang literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Barat.

Selain program Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM), ada program yang sejak dahulu sudah di berlakukan oleh pemerintah yaitu kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa diakses di beberapa lembaga keuangan. Namun sulitnya mengakses pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang membuat masyarakat masih banyak yang belum mengakses bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh pihak lembaga keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UKM sehingga rendahnya tingkat inklusi keuangan terhadap bantuan-bantuan yang di tawarkan melalui lembaga keuangan.

Persyaratan yang dianggap paling sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha adalah tidak semua UKM memiliki harta yang memadai untuk dijadikan jaminan. Namun tidak semua pelaku UKM buta dengan semua persyaratan perbankan, dari survei pendahuluan pada beberapa pelaku UKM pengolahan hasil peternakan seperti pada produsen rendang dan produsen kerupuk kulit yang cukup terkenal di kota Padang, bahwa mereka juga menggunakan jasa perbankan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu perlu dikaji seberapa besar pengaruh pengetahuan literasi dan inklusi keuangan terhadap keberhasilan UKM pengolahan produk peternakan.

Ketidakmampuan dalam mengakses keuangan disebabkan rendahnya pengetahuan pelaku usaha untuk mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif dan juga belum memahami dengan baik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan formal yang

biasa dikenal dengan literasi keuangan. Selain itu pelaku usaha juga kurang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga jasa keuangan mengenai karakteristik, manfaat, resiko, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan produk perbankan contohnya perkreditan dan layanan keuangan seperti rekening, giro dan lain-lainnya yang bisa biasa dikenal dengan inklusi keuangan.

Keterbatasan yang mereka hadapi tentang literasi dan inklusi keuangan menyebabkan sulitnya pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sumatera Barat dalam mengakses permodalan dari Lembaga keuangan formal. Besarnya kontribusi UKM di Sumatera Barat membuat banyaknya tantangan bagi pelaku usaha untuk siap dalam bersaing dengan UKM lainnya. Pelaku UKM diharapkan dapat menciptakan usaha baru dan berbeda, selain UKM juga diharapkan memiliki kinerja yang bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat Abor dan Quartey (2010), UKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, hal ini disebabkan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengolahan usaha.

Kinerja UMKM dapat diukur hasilnya melalui mekanisme manajemen usaha yang baik dengan meninjau susunan pencatatan laporan keuangan, Menurut Rapih, S. et al (2015) yang menjadi indikator dari kinerja UKM adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan keuntungan. Kinerja dapat mencerminkan kemampuan keberhasilan atau tidaknya perusahaan dari waktu ke waktu, maka dari itu perlunya strategi untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola keuangan, manajemen utang, manajemen kredit dan tabungan dapat membantu pelaku usaha

UKM dalam membuat laporan keuangan, laporan keuangan yang baik mencerminkan kondisi usaha yang baik pada suatu perusahaan. Oleh karena itu pengetahuan tentang literasi keuangan merupakan hal yang sangat krusial bagi pelaku UKM untuk meningkatkan kinerja bisnis pada usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM PADA INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN HASIL TERNAK DI SUMATERA BARAT “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM pada industri pengolahan makanan yang berasal dari hasil ternak di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM pada industri pengolahan makanan yang berasal dari hasil ternak di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM pada industri pengolahan makanan yang berasal dari hasil ternak di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM pada industri pengolahan makanan yang berasal dari hasil ternak di Sumatera Barat.

2. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM pada industri pengolahan makanan yang berasal dari hasil ternak di Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM pada industri pengolahan makanan yang berasal dari hasil ternak di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman tentang literasi keuangan, inklusi keuangan dan kinerja UMKM .
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk kebijakan dan merancang strategi dalam meningkatkan kinerja UMKM dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Serta mengevaluasi apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sesuai target yang ingin dicapai atau masih perlu menambah langkah untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan serta kinerja UMKM.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha agar semakin memahami dan mampu menggunakan layanan keuangan yang ada dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.